



# Dipertanyakan, Banggar Mulai Bahas KUA/PPAS Induk 2016

Denpasar (Bali Post) –

Jajaran Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Denpasar mulai membahas kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) APBD Induk 2016. Padahal, KUA dan PPAS APBD Perubahan 2015 belum masuk ke meja Dewan. Akibatnya, sejumlah anggota Banggar DPRD Denpasar mempertanyakan kebijakan yang dinilai kurang runut ini.

Sejumlah anggota DPRD Denpasar seperti Ketut Budiarta, I.B. Kompyang Wiranata, Wayan Warka dan A.A. Susruta Ngurah Putra di kantornya, Kamis (18/6) kemarin mengakui Banggar telah mengagendakan untuk melakukan pembahasan KUA dan PPAS Induk 2016. Mereka mengakui, pembahasan

APBD Perubahan yang semestinya lebih awal, justru belum masuk. "Kalau untuk APBD Perubahan 2015 belum ada. Mungkin ini yang lebih dulu dibahas," ujar Susruta.

Atas kondisi ini, Ketut Budiarta dan Wayan Warka mengaku tidak mengerti. Menurut mereka, seharusnya yang lebih awal

dibahas adalah KUA dan PPAS APBD Perubahan. Mengingat, pemberlakuannya lebih awal dari APBD Induk 2016. "Makanya saya baru tadi mempertanyakan ini bersama teman-teman. Kok bisa KUA dan PPAS Induk 2016 yang lebih dulu dibahas," ujar Budiarta dan Warka, kemarin.

Di sisi lain, I.B. Kompyang Wiranata yang juga Ketua Komisi II (bidang keuangan) mengatakan, tidak ada masalah bila pembahasan KUA dan PPAS Induk 2016 lebih awal dibahas. Namun menurut dia, logikanya akan lebih tepat bila perubahan yang lebih awal dibahas karena menyangkut estimasi perolehan pendapatan dan rencana pen-

geluaran yang akan dilakukan. Misalnya, bila pada APBD Perubahan terjadi penambahan atau pengurangan yang signifikan, tentu akan memengaruhi juga estimasi APBD tahun berikutnya. "Kalau secara prinsip sih tidak ada masalah. Hanya untuk estimasinya saja mungkin bisa kurang tepat, karena harus melihat perkembangan yang di perubahan," katanya.

Dari pengamatan sementara, alokasi yang ada dalam KUA dan PPAS Induk 2016 menunjukkan adanya beberapa perubahan dalam struktur APBD tahun depan. Seperti salah satu yang tercantum, yakni mengecilnya belanja publik yang dialokasikan Pemkot



Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 0361-7400391.

Denpasar ke depan di bandingkan APBD Induk 2015 ini. Sementara untuk belana pegawai, justru mengalami peningkatan. "Ini menunjukkan program untuk masyarakat secara langsung akan mengalami penurunan. Berbeda dengan belanja pegawai yang naik. Artinya, ada kemungkinan jumlah pegawai kontrak yang terus meningkat sehingga belanja pegawai naik secara signifikan," ujar salah seorang anggota Banggar. (kmb12)

Edisi : Jumat, 19 Juni 2015

Hal : 2



# DKP Kota Terganjil Kontrak PT NOEI

## Tolak Tawaran Pengelola Sampah Baru

DENPASAR - Persoalan sampah di Kota Denpasar hingga kini masih menjadi persoalan yang belum mampu dituntaskan pihak Pemkot. Kondisi demikian diperparah juga dengan ketidakmampuan PT Navigat Organic Energy Indonesia (NOEI) menjalankan kewajiban sesuai kesepakatan dalam pengelolaan sampah di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Kota Denpasar di Suwung.

Persoalan ini ternyata tidak

selesai sampai dengan hal tersebut, kini muncul pihak perusahaan swasta lain yang menawarkan kerjasama serupa menggantikan PT NOEI untuk melakukan pengolahan sampah di Denpasar. Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan sampah itu adalah PT. Djnar Lentera Indonesia (DLI).

DLI sendiri menawarkan salah satu solusi untuk mengatasi sampah di Kota Denpasar dengan memanfaatkan teknologi Incenerator (sebuah teknologi yang menggunakan sistem pembakaran). "Kami menilai untuk mengatasi sampah di Kota Denpasar, teknologi yang cukup tepat

diterapkan adalah *technology Incenerator*," kata Chairman PT. Djnar Lentera Indonesia, Imam Subchi, saat melakukan presentasi penanganan sampah dengan *technology incinerator* pada Jajaran Dewan Kota Denpasar, Kamis kemarin (18/6).

Pihak DLI sendiri diterima Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar I Wayan Mariyana Wandhira, didampingi ketua komisi I Ketut Suteja Kumara, ketua komisi III Eko Supriadi, serta ketua komisi IV Gede Semara. Dalam presentasinya, DLI merupakan perusahaan swasta bernaung di bawah *Nippon Steel & Sum-*

*ikin Engineering. Co. Ltd.*, DLI mengklaim jika pihaknya bisa mengatasi masalah sampah yang ada di Kota Denpasar. "Melihat kondisi sampah di TPA Suwung tidak akan bisa teratasi jika tidak menggunakan teknik pengelolaan dengan teknologi yang tepat," ujarnya.

Menurut Imam Subchi, tumpukan sampah akan terus terjadi dan bahkan memerlukan lahan yang semakin luas. "Untuk itu *Technology Incenerator* ini cukup relevan digunakan di Kota Denpasar," terangnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Kebersihan dan Perta-

manan (DKP) Kota Denpasar, I Ketut Wisada mengaku belum mengetahui mengenai PT. Djnar Lentera Indonesia (DLI) tersebut. Meski ada banyak pihak yang menawarkan kerjasama, namun DKP sendiri tidak bisa menerima salah satunya. Ini disebabkan kerjasama dengan PT. NOEI masih berlaku hingga tahun 2024 nanti. "Kalau mau memutuskan juga tidak bisa. Karena pola kerjasama *kan* tidak hanya Denpasar saja. Tapi lintas daerah yang masuk dalam Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan)," imbuhnya. **(hen/han)**

Edisi : Jumat, 19 Juni 2015

Hal : 24



## Jelang Pilkada Badung

# KPK Awasi Penggunaan Bansos dan Hibah

Mangupura (Bali Post) –

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menurunkan tim ke sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Badung. Kehadiran KPK ke daerah guna mengawasi penggunaan dana hibah dan bantuan sosial (bansos) menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada), Desember mendatang. Spesialis Kampanye Sosial Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Alfi Rachman Waluyo mengatakan, upaya tersebut untuk memastikan pilkada berjalan dengan berintegritas, yakni dengan mendorong terbentuknya calon kepala daerah yang berintegritas, terbentuknya penyelenggara pilkada yang berintegritas, dan mendorong terbentuknya pemilih yang berintegritas.



Bali Post/par

Alfi Rachman Waluyo

“Salah satu cara bagaimana mendorong terpilihnya kepala daerah yang berintegritas, KPK akan menurunkan tim untuk memastikan tidak ada penyelewengan keuangan negara untuk kepentingan kampanye,” ujar Alfi dalam Seminar “Demokrasi Tanpa Korupsi”, Rabu (17/6) sore. Menurutnya, penyalahgunaan keuangan negara merupakan salah satu tindak pidana korupsi yang harus ditindak secara hukum. Salah satunya, penyalahgunaan dana hibah dan bansos untuk keperluan kampanye. “Biasanya akan ada sumbangan-sumbangan menggunakan dana hibah atau Bansos dan sumbangan dana menggunakan APBD. Ini masuk dalam penyalahgunaan keuangan negara,” tegasnya.

Terkait apakah penggunaan dana pribadi dalam kampanye diperbolehkan, Alfi mengatakan, KPK bukan pada korodir memperbolehkan atau tidak. Hanya saja, pihaknya berharap kepala daerah yang terpilih nantinya benar-benar memiliki kemampuan (*capable*), berintegritas dan memiliki komitmen memajukan masyarakat Bali, khususnya Badung. “Kami berharap kepala daerah yang terpilih (Badung-red) bukan kepala daerah yang dilihat dari beberapa banyak sumbangannya, tetapi masyarakat bisa memilih kepala daerah yang jelas integritasnya, rekam jejaknya, dan kemampuannya,” tegasnya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Badung A.A. Gede Raka Nakula mengungkapkan, pihaknya berkomitmen menyelenggarakan pilkada yang berintegritas sehingga pemilihan bupati dan wakil bupati benar-benar berjalan sesuai dengan harapan. “Intinya, komitmen kami di Badung khususnya, apalagi ada pendampingan dari KPK, akan melaksanakan pemilu secara berintegritas sesuai dengan apa yang disampaikan KPK tersebut,” ucapnya.

Hanya saja, dalam penyelenggaraan pilkada yang berintegritas, Nakula berharap dukungan dari partai politik dan masyarakat Badung. “Pemilu berintegritas itu tidak saja oleh penyelenggara, tetapi harus didukung oleh partai politik dan masyarakat itu sendiri,” pungkasnya. (kmb27)

Edisi : Jumat, 19 Juni 2015

Hal : 2



### Kasus CPNS

## Dua Saksi Meringankan Candra Dewi Diperiksa

Tabanan (Bali Post) -

Jika sebelumnya tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan telah melakukan penyidikan lanjutan dengan memeriksa dua saksi yang meringankan tersangka I Gede Jagrem, mantan Kabid Angkutan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Tabanan, yang terlibat kasus dugaan pemerasan CPNS, Kamis (18/6) kemarin giliran dua saksi kembali dipanggil tim penyidik kejaksaan. Kali ini, dua saksi tersebut yang meringankan Candra Dewi, tersangka lainnya yang tersandung kasus yang sama.

Kedua saksi itu adalah AAB dan IAT, yang sama-sama bekerja sebagai staf DKP. Kedua saksi datang memenuhi panggilan tim penyidik kejaksaan pukul 10.00 wita. Baik AAB maupun IAT kemudian diperiksa secara terpisah. AAB diperiksa jaksa Ray Joni, S.H., sementara IAT diperiksa jaksa Alipin, S.H. sampai dengan pukul 12.00. "Pemeriksaan mereka seputar

pemerasan yang dilakukan oleh tersangka," ujar Kasi Pidsus Kejari Tabanan Fathur Rochman.

Setidaknya untuk saksi AAB diajukan 10 pertanyaan dan IAT dengan 11 pertanyaan. Setelah memeriksa masing-masing dua orang saksi dari dua tersangka yakni I Gede Jagrem dan Candra Dewi, pihaknya juga akan melanjutkan penyidikan dengan memanggil para tersangka. "Rencananya minggu depan, kami akan kembali memeriksa tersangka sebagai saksi mahkota," ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, meski telah menahan kedua tersangka, tim penyidik Kejaksaan Negeri Tabanan akan terus melanjutkan penyidikan. Kedua tersangka yakni I Gede Jagrem dan Candra Dewi ditahan kejaksaan karena melihat hasil akhir pemeriksaan telah melanggar pasal yang disangkakan yakni Pasal 12e UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (kmb28)

Edisi : Jumat, 19 Juni 2015

Hal : 16



Sidang Dugaan Korupsi Bantuan Sapi

# Anak dan Istri Pojokkan Terdakwa

Denpasar (Bali Post) -

Sidang dugaan korupsi bantuan sapi Bali betina dengan terdakwa Ni Made Sumertayanti, I Mangku Laba dan I Made Juliasa, Kamis (18/6) kemarin dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Jaksa penuntut umum (JPU) Eca Marimutha, dkk. di hadapan majelis hakim diketuai Dewa Suardita didampingi hakim anggota Ahmad Peten Sili dan Guntur, menghadirkan lima saksi.

Yang menarik, dari lima orang saksi yang dihadirkan, dua di antaranya adalah anak dan istri terdakwa. Mereka adalah Ni Wayan Sayang, Ni Ketut

Pudak, I Wayan Wenten, Ketut Crita, Wayan Soma. Pudak adalah istri Juliasa dan Sayang adalah anak Mangku Laba. Dalam persidangan, keduanya tetap bersedia menjadi saksi, walau akhirnya mereka memojokkan terdakwa karena mereka tidak mengetahui jika namanya dimasukkan dalam Kelompok Tani Ternak Pucang Sari. "Saya tidak tahu tiba-tiba nama saya dimasukkan dalam kelompok ini," jelas saksi kompak.

Demikian halnya saksi *pangadas* (pemelihara), juga tidak mengetahui namanya dimasukkan ke dalam kelompok tani. Mereka tahunya bahwa dia diberikan sapi

(*ngadas*) dan hasilnya dibagi dua, yakni saksi *pangadas* dapat 50 persen.

Atas keterangan lima saksi yang kompak mengaku tidak mengetahui soal kelompok tani itu, sidang berlangsung cukup cepat. Bahkan saat terdakwa yang didampingi kuasa hukumnya, Bimantara Putra, ditanya hakim, membenarkan nama-nama itu asal copot saja. "Ya, saya masukkan saja nama-namanya," ujar terdakwa Juliasa polos. Sebelum ketok palu untuk melanjutkan sidang pekan depan, majelis hakim sempat menanyakan soal BAP. Dan saksi mengatakan bahwa BAP-nya benar semua. (kmb37)

Edisi : Jumat, 19 Juni 2015

Hal : 3



Bali Post



# Pemanfaatan Gedung Eks RSUD Tak Pasti



Bali Post/sos

Edisi : Juni, 19 Juni 2015

Hal : 9



## Bangli (Bali Post) -

Pemanfaatan gedung eks Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangli yang saat ini berada pada dua kepentingan, yakni kepentingan pemerintah daerah dan pemerintah provinsi tak kunjung menemui titik terang. Pasalnya, koordinasi pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi terkait waktu dimulainya pemanfaatan gedung itu hingga saat ini belum mendapatkan jawaban dan terkesan digantung. Padahal, pemerintah daerah sangat membutuhkan gedung untuk sejumlah SKPD.

Kepala Bagian Umum Setda Bangli I Made Mahindra Putra, Kamis (18/6) kemarin, mengungkapkan hingga saat ini pihaknya hanya mendapatkan jawaban dari Pemprov bahwa gedung eks RSUD itu direncanakan dimanfaatkan sebagai rumah sakit rehabilitasi narkoba. Adanya jawaban yang terbatas, membuat pihak pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan Bagian Aset Pemprov terkait kapan gedung itu dimanfaatkan. Namun sayang, dikatakan Mahindra Putra, hingga saat ini jawaban pun tak kunjung ada.

"Rencana pemanfaatan gedung itu dari pemprov sudah ada. Namun terkait kapan dimanfaatkan, hingga saat ini kami belum mendapatkan jawaban. Padahal hal itu sangat kami perlukan," jelasnya.

Guna mempercepat pemanfaatan gedung itu, pihaknya sempat

merencanakan untuk saling hibah aset dengan RSUD Bangli yang merupakan aset Pemerintah Provinsi Bali yang kini berstatus sebagai hak pakai. "Kami berencana untuk saling hibah aset antara eks rumah sakit dengan RSUD Bangli sekarang yang merupakan milik provinsi dan saat ini masih berstatus sebagai hak pakai oleh pemerintah daerah," katanya.

Dijelaskan juga, apabila tidak melakukan saling hibah aset, pemerintah daerah hanya bisa meminjam gedung eks RSUD itu. Namun, waktunya sangat singkat. Jika waktu peminjaman itu sudah berakhir, secara otomatis pemerintah daerah harus kembali mencari tempat untuk SKPD yang gedungnya kurang representatif. Oleh sebab itu, saling hibah ini dianggap sebagai salah satu solusi untuk menyikapi keadaan ini. (kmb45)

Edisi : \_\_\_\_\_

Hal : \_\_\_\_\_



## Temuan BPK

# Pemkab Diminta Stop Pungut Pajak

## Galian C Bodong

Amlapura (Bali Post) -

Pajak galian C telah menjadi andalan Karangasem dalam mendulang pendapatan asli daerah (PAD). Tak peduli galian C itu berizin atau tanpa izin alias bodong asal bisa menggelembungkan pundi-pundi PAD. Hal ini menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karena itu, pemerintah Kabupaten Karangasem dilarang melakukan pungutan pajak terhadap operasional galian C. Larangan itu, khusus terhadap operasional usaha galian C tanpa izin alias bodong, yang selama ini tidak ditertibkan.

Tampaknya usaha galian C seperti itu cukup banyak beroperasi di Karangasem,

dengan melabrak perda. Jika itu terus dibiarkan akan menimbulkan kerusakan lingkungan yang lebih parah.

Fakta itu disampaikan Wakil Bupati Karangasem,

Made Sukerana, saat bertatap muka dengan masyarakat Kecamatan Sidemen, di Wantilan Pura Puseh, Desa Tabola, Sidemen, Kamis (18/6) kemarin. Sukerana menyampaikan, larangan tersebut tertuang dalam temuan BPK tahun ini, terhadap hasil LHP LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) tahun anggaran 2014. Ia mengakui, penertiban galian C di Kabupaten Karangasem cukup sulit. Perda galian C masih menetapkan aturan hingga ketinggian 500 meter. Tetapi, galian C di kawasan Kecamatan Selat dan Rendang dikatakan sudah melebihi 500 meter. Pelanggaran tata ruang ini, justru sangat berbahaya. Soalnya pada ketinggian itu yakni lereng Gunung Agung merupakan kawasan hutan, daerah tangkapan atau resapan air hujan, ada banyak pura dan permukiman penduduk.

Meski demikian, pihaknya menegaskan bakal berupaya menindaklanjuti serius temuan BPK tersebut dengan instansi terkait lainnya. Kalau memang sudah tidak berizin, sebagaimana diatur

dalam perda, akan segera ditertibkan. Namun sebelum langkah itu ditempuh pemerintah daerah, pihaknya kembali mengingatkan agar operasional galian C bodong, sadar diri dan tidak melakukan pengerukan lagi. Ia meminta dukungan kekuatan adat di wilayah setempat, untuk membantu pemerintah daerah menyadarkan masyarakat setempat yang masih bandel dengan melakukan pengerukan tanpa izin, terutama di Kecamatan Rendang dan Selat.

Galian C selama ini telah menjadi aktivitas pertambangan yang menjadi andalan penyumbang PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Karangasem sejak era Bupati Wayan Geredeg. Sejak tahun 2009 PAD yang hanya Rp 42,47 miliar, kemudian tahun 2010 meningkat menjadi sebesar Rp 55,18 miliar, tahun 2011 langsung meroket menjadi Rp 121,58 miliar, tahun 2012 sebesar Rp 130,26 miliar, tahun 2013 sebesar Rp 158,14 miliar, tahun 2014 sebesar Rp 202,73 miliar, dan tahun 2015 baru mencapai Rp 205,27 miliar. (kmb31)

Edisi : Jumat, 19 Juni 2015

Hal : 15



# Plafon Jamkrida Capai Rp 1,9 T

## Ajak Kabupaten/ Kota Tanam Modal

**DENPASAR** - Capaian positif diraih PT Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara. Sebagai lembaga penjamin kredit daerah, Jamkrida mampu menjadi pendorong kemajuan khususnya untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Bali.

Seperti ditegaskan Direktur Utama PT Jamkrida Bali Mandara I Ketut Widiani Karya. Dikonfirmasi di sela pelaporan perkembangan lembaga penjamin kredit kepada Gubernur Bali Made Mangku Pastika, kemarin (18/6), dia menyatakan bahwa sejak dibentuk pada Juni 2011, saat ini dengan memasuki tahun ke-5, PT Jamkrida mampu menjadi lembaga penjamin

kredit di daerah. "Sebagai wujud pencapaian itu, saat ini PT Jamkrida telah melakukan penjaminan bagi 21.777 nasabah dengan plafon sebesar Rp 1,9 triliun," beber dia.

Bahkan, lanjut dia, dari total nasabah, 62 persen di antaranya merupakan UMKM yang bergerak di sektor ekonomi produktif. Pihaknya berharap, dengan capaian ini, ke depan PT Jamkrida bisa menjadi lembaga penjamin yang lebih baik dalam mendorong kemajuan UMKM di daerah," harapnya.

Sejalan dengan pesatnya pertumbuhan yang dicapai, kata dia, PT Jamkrida Bali Mandara juga terus melakukan upaya peningkatan kualitas layanan. Salah satunya dengan merekrut personel di setiap kabupaten/kota. Mereka bertugas memberi penjelasan kepada masyarakat yang

membutuhkan informasi terkait dengan keberadaan Jamkrida Bali Mandara. Selain itu, pihaknya juga mengembangkan kerjasama dengan BPR, LPD dan Koperasi. Saat ini, pihaknya telah menjalin kerjasama dengan 30 BPR yang tersebar di seluruh Bali. Ke depannya, kerjasama ini akan terus dikembangkan untuk meningkatkan layanan bagi para nasabah yang membutuhkan kredit namun tak punya jaminan. Lebih dari itu, Jamkrida Bali Mandara juga terus melakukan upaya integrasi dengan program unggulan lainnya seperti Simantri dan Gerbangsadu.

"Kami sudah menyosialisasikan program ini pada sejumlah penerima program Gerbangsadu dan Simantri. Mereka bisa menambah modal dengan penjaminan

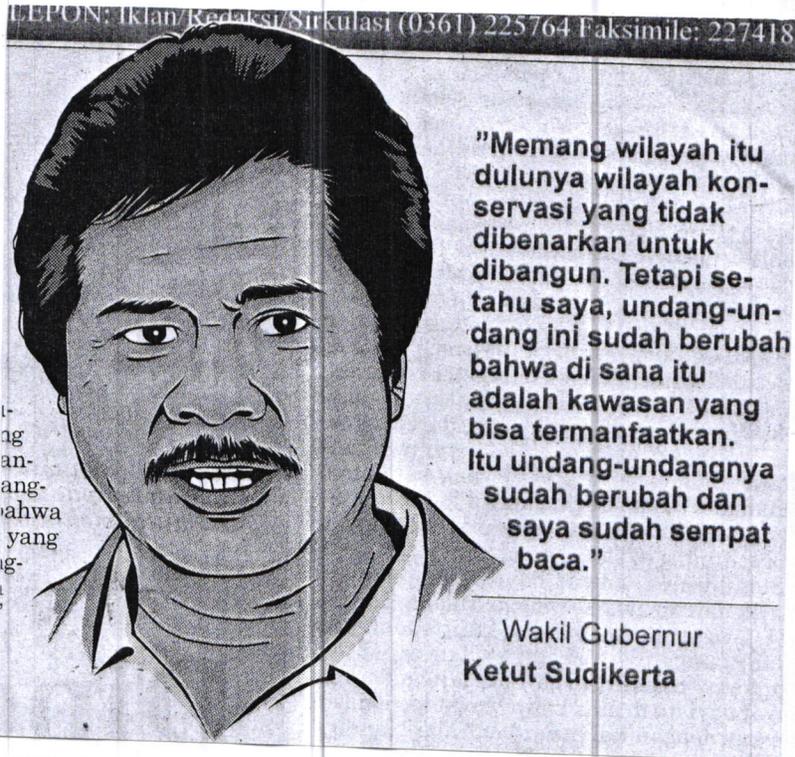
Jamkrida," tambahnya.

Sementara Gubernur Pastika menyatakan cukup puas dengan capaian yang diraih Jamkrida Bali Mandara selama kurun waktu 4,5 tahun. Hanya saja, dia mengingatkan agar Jamkrida Bali Mandara tak serta merta puas dengan apa yang diraih. "Yang paling penting, program ini membawa manfaat positif bagi masyarakat Bali," ujarnya.

Mengingat manfaatnya yang makin dirasakan oleh masyarakat khususnya pelaku UMKM, dia mendorong Kabupaten/Kota untuk menambah penyertaan modal di PT Jamkrida Bali Mandara. Hal ini penting agar perusahaan penjamin milik daerah ini dapat lebih banyak lagi melakukan penjaminan bagi mereka yang membutuhkan. (pra/yor)

Edisi : Jumat, 19 Juni 2015

Hal : 22



**Geothermal Kembali Mengemuka**

# Wagub Sudikerta Sebut Harus Dijalankan

PEMANFAATAN energi panas bumi atau geothermal di Bedugul kembali mengemuka. Keinginan pemerintah untuk membangkitkan lagi geothermal dibungkus rapi dalam rencana pengembangan Bali sebagai kawasan nasional energi bersih. Dalam hal ini, Bali akan dijadikan *pilot project* energi baru terbarukan yang ramah lingkungan.

Seperti yang terungkap dalam pertemuan antara Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta dengan Kementerian ESDM, dalam hal ini Satgas Percepatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan (P2EBT) di Gedung Wiswasabha, Kamis (18/6) kemarin. Pertemuan ini juga dihadiri dinas terkait di Pemprov

Bali, PLN Distribusi Bali, Pertamina, PT Indonesia Power, dan Perusda Bali.

Satgas P2EBT Reza Kusumaatmadja mengatakan, kerangka pengembangan Bali sebagai kawasan pengembangan energi bersih terbagi dalam tiga tier. Masing-masing, *on grid energy* pada 2015-2016 (0 s.d. 18 bulan), *off grid energy* pada 2016-2017 (12 s.d. 36 bulan), dan energi bersih masa depan pada 2017-2018 (36 bulan ke depan). Pengembangan PLT panas bumi di Bedugul dimasukkan dalam tahap *on grid energy*.

"Salah satu hal yang bisa ditindaklanjuti juga mungkin secara komunikasi harus diperbaiki adalah yang di

Edisi : Jumat, 19 Juni 2015

Hal : 1



Bedugul, geothermal," ujarnya. Selain geothermal, *on grid energy* juga meliputi konversi dari diesel atau batu bara ke gas (PLTG Pamaron dan PLTG Gilimanuk), pengembangan PLTG baru di barat dan timur, peyiapan SPBG, dan *waste to energy* di TPA Suwung. Sementara pembangunan *Center on Excellence* energi baru terbarukan di Bali baru direncanakan pada tahap energi bersih masa depan.

Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta secara spontan langsung menyatakan bila geothermal memang harus dijalankan. Terlebih saat ini, persoalan perizinan yang dulu menghambat menurutnya sudah teratasi lantaran

sudah ada revisi Undang-undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

"Memang wilayah itu dulunya wilayah konservasi yang tidak dibenarkan untuk dibangun. Tetapi setahu saya, undang-undang ini sudah berubah bahwa di sana itu adalah kawasan yang bisa dimanfaatkan. Itu undang-undangnya sudah berubah dan saya sudah sempat baca," ujar Sudikerta.

**Hal. 23**  
**Ramah Lingkungan**

## Ramah Lingkungan

### Dari Hal. 1

Mantan Wakil Bupati Badung ini juga menyebut masyarakat Bali sejatinya tidak menolak geothermal. Apalagi geothermal bisa menghasilkan energi yang ramah lingkungan, sekaligus mampu menyokong Bali un-

tuk mandiri secara energi.

"Gas (energi ramah lingkungan - red) yang kita harapkan ada di geothermal yang ada di Bedugul tetapi distop oleh sebagian kecil LSM yang ada di Bali ini. Tetapi masyarakatnya sesungguhnya tidak," jelasnya. (kmb32)

Edisi : Jumat, 9 Juni 2015

Hal : 23